



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.195/M.PPN/SES/HK/10/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBANGUNAN MUSEUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun perencanaan dan rekomendasi pembangunan museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan kajian pembangunan museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBANGUNAN MUSEUM KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan bertugas:

- a. merumuskan, menyusun dan menetapkan jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;
- b. mencari, mengumpulkan dan menyusun bahan, data, dan informasi mengenai museum, pelaksanaan museum di kementerian/lembaga;
- c. menganalisa data, bahan, dan informasi dalam rangka penilaian terhadap pencapaian hasil kajian museum;
- d. menyusun rekomendasi untuk pembangunan museum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kajian kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.98/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian PPN/Bappenas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 195/M.PPN/SES/HK/10/2019
TANGGAL 18 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PEMBANGUNAN MUSEUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : M. Defit Djamil, SE, ME.

- Anggota :
1. Taufik Rigo, SAG, MAIIR, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Tuhu Wagiono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Suhartatik, ST, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. B. Djoko Suroto, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Ismet Mohamad Suhud, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Atisomya ...

14. Atisomya Nareswari, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dra. Kris Hapsari, M.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia;
17. Suharti, S.Hum, Arsip Nasional Republik Indonesia.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sarono Santoso;
2. Raup, SAP;
 3. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md;
 4. Idris Subagja;
 5. Suharna;
 6. Zulkarnain.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati